

**KAJIAN INKLUSI SOSIAL DAN KEUANGAN SERTA
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**¹Lia Nazliana Nasution; ²Desi Astuti^{1,2}Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Pembangunan Panca Budi, Jl. Jend. Gatot Subroto,
Km4,5, Medan 20122Email : lianazliana@dosen.pancabudi.ac.id, desiastuti1996@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktor-faktor yang diduga memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan keuangan inklusi. Metode analisis yang digunakan adalah korelasi parsial dengan kombinasi tiga variabel kontrol yaitu tingkat pendidikan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Dan variabel yang mewakili keuangan inklusi yaitu variabel jumlah kantor cabang dari bank terpilih dan jumlah tabungan masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2011 sampai 2016. Hasil yang diperoleh adalah: Variabel jumlah kantor cabang memiliki hubungan yang sangat kuat, dengan dan tanpa variabel kontrol. Variabel kontrol tingkat Pendidikan menghasilkan hubungan yang paling erat yaitu sebesar 0,995. Hubungan antara jumlah kantor cabang dengan tingkat pendidikan juga kuat, dengan dan tanpa variabel kontrol. Variabel kontrol yang baik dalam menilai hubungan kedua variabel ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi. Hubungan antar variabel yang menghasilkan nilai korelasi parsial lemah ditunjukkan oleh hubungan jumlah tabungan dan tingkat pendidikan masyarakat dengan variabel penduduk miskin sebagai variabel kontrol. Hampir keseluruhan nilai signifikansi menunjukkan tidak signifikan, artinya hubungan antar variabel ini walaupun masuk kategori erat namun memiliki sisi lemah sehingga dibutuhkan modifikasi metode analisis lain atau variabel pendukung lainnya.

Kata Kunci : *Tingkat Pendidikan, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat di dunia khususnya kelompok miskin dan rentan belum memiliki akses terhadap layanan keuangan (*financial services*) secara penuh. Menurut hasil survei CGAP dan *World Bank* (2010) sebanyak 2,7 milyar penduduk dunia tidak memiliki akses kredit, asuransi dan tabungan. Masih menurut Bank Dunia (2010) secara nasional Indonesia hanya 52% dari penduduk yang menjangkau akses sistem keuangan formal. Disisi lain terdapat 31% penduduk mengakses keuangan informal dan 17 % penduduk yang mengalami keuangan eksklusif (tidak mengakses sistem keuangan) . Sebanyak 50% penabung menyimpan uangnya di sektor keuangan formal bank, 18 % penabung menyimpan uangnya di sektor informal . Hal ini menggambarkan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memanfaatkan fasilitas keuangan, minimal melakukan penyimpanan sebagian pendapatannya dalam bentuk tabungan. Banyak faktor yang menyebabkan individu terhambat atau tidak mengakses fasilitas keuangan, mulai dari masih rendahnya pengetahuan produk-produk keuangan, minimnya fasilitas perbankan yang tersedia, dan jangkauan perbankan yang masih terbatas.

Pada tanggal 18-19 Juni 2012 dalam acara *Leaders Summit di Los Cabos Meksiko*, G20 meluncurkan *Financial Peer Learning Program (FPLP)* dan *Global Partnership on Financial Inclusion (GPFI)*. Di kesempatan itu, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan bahwa Indonesia juga akan meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang nantinya akan menjadi acuan dalam mensinergikan upaya perluasan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin kepada sektor keuangan formal sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia (Rakhmindyarto & Syaifullah, 2014). Adapun Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) itu sendiri dirancang dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tujuan SNKI adalah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemampuan keuangan masyarakat dan menciptakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (www.bi.go.id). Keseluruhan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Indonesia termaktub dalam 6 pilar, diharapkan dengan membagi dalam keenam pilar tersebut tujuan keuangan inklusif Indonesia dapat tercapai.

Pengentasan kemiskinan itu sendiri memadukan antara sosial inklusif, keuangan inklusif dan ekonomi inklusif. Sosial inklusif sendiri memberikan akses yang luas kepada masyarakat akan kebutuhan dasar, terkait khususnya layanan kesehatan bagi masyarakat, pendidikan dan mobilisasi sosial, seperti yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Keuangan inklusif memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dengan meningkatkan kelayakan masyarakat. Sedangkan ekonomi inklusif bertujuan untuk memberikan peluang atau akses terhadap masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan seperti pemberdayaan UMKM. (Rakhmindyarto&syafullah, 2014). Sinergi keseluruhan poin-poin tersebut akan memunculkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Sosial inklusif akan melahirkan masyarakat yang sehat, berpendidikan cukup baik, dan memunculkan mobilisasi sosial yang baik khususnya mobilisasi yang mendukung ekonomi masyarakat. Kemudian pencapaian sosial inklusif didukung dengan pencapaian keuangan inklusif seperti penggunaan akses keuangan bank dan non bank dalam keseharian masyarakat. Pendidikan yang memadai memungkinkan penggunaan akses keuangan lebih baik. Kesehatan yang baik akan mendorong peningkatan kesejahteraan dan perekonomian, hal ini akan menjadi lebih baik ketika masyarakat dapat menggunakan akses keuangan dalam setiap kegiatannya. Maka pada akhirnya akan memunculkan masyarakat yang matang secara sosial dan ekonomi.

Penelitian terkait dengan pertumbuhan ekonomi maupun keuangan inklusif telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti Indonesia maupun negara lain. Hasil penelitian-penelitian tersebut juga beragam, begitu pula dengan metode maupun variable yang diteliti. Diantaranya hasil penelitian yang dilakukan oleh *Isac dan Evelyn* (2012) terkait pengaruh literasi keuangan terhadap akses jasa keuangan di Kenya pada tahun 2009, ternyata akses terhadap jasa keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan tetapi lebih besar dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, jarak dari bank, usia, status perkawinan, jenis kelamin, ukuran rumah tangga, dan tingkat pendidikan. Adapun penelitian *Thorsten & Demircuc*. (2007) di 99 negara pada tahun 2003-2004 menunjukkan bahwa faktor yang menentukan jangkauan sektor keuangan sama dengan faktor yang menentukan kedalaman sektor keuangan. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat dari pembangunan yang diprosikan dengan GDP per kapita, kualitas institusi yang diprosikan dengan *governance index*, serta informasi kredit yang diprosikan dengan *credit information index*. *Van der Werff et al.* (2013), dalam penelitiannya di 31 negara OECD tahun 2011, menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi proporsi populasi yang mengakses perbankan adalah ketimpangan pendapatan, jumlah ATM dan bank per 100.000 populasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang diprosikan dengan *corruption index* dan GNI per kapita. Inklusi keuangan juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Indonesia diantaranya penelitian dari Retno (2012) melakukan penelitian pengaruh pendidikan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. LANDASAN TEORI

Perbankan merupakan institusi yang ditunjukkan oleh pemerintah sebagai salah satu motor keuangan Negara. Perbankan berperan sebagai penghimpun, penyalur dan lembaga pendamping keuangan masyarakat. Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. (Kasmir, 2016). Hal ini dikarenakan sector-sektor tersebut merupakan sector riil yang memiliki peran aktif dalam perekonomian dan keuangan Negara.

Saat ini yang memiliki kesempatan untuk menabung dengan jumlah yang banyak adalah orang kaya, karena mereka memiliki pendapatan yang lebih yang tidak habis untuk dikonsumsi, sementara orang miskin sendiri cenderung tidak memiliki kesempatan untuk menabung, karena sebagian besar pendapatan mereka telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila tingkat bunga bank tinggi, masyarakat cenderung untuk tidak membelanjakan uangnya untuk membeli barang dan jasa dan menyimpannya di bank. Hal ini disebabkan masyarakat tidak ingin kehilangan untuk memperoleh pendapatan bunga dari uang yang dimilikinya. Begitu pula sebaliknya.

Menurut Suparmoko (1997:53) Jumlah penduduk adalah manusia dan bukan yang lainnya (misalnya : ternak, tumbuhan, dan sebagainya) yang melakukan produksi maupun konsumsi. Tampak jelas bahwa penduduk merupakan faktor yang justru lebih serius di sektor pertanian dibanding sektor di luar pertanian. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pertumbuhan penduduk justru mendorong usaha pertumbuhan ekonomi, sebab kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi niscaya standar hidup manusia pasti semakin merosot. (Suparmoko, 1997:53) Penduduk dipandang sebagai nasabah yang akan melakukan kegiatan menabung. Seperti yang diutarakan oleh Kasmir, bahwa dana terbesar sektor perbankan di dominasi oleh dana pihak ketiga yaitu yang diperoleh dari masyarakat. (Kasmir, 2003:19). Makin banyak jumlah penduduk makin tinggi pula jumlah dana tabungan masyarakat yang dihimpun oleh sektor perbankan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang menjelaskan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian asosiatif adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui antara dua variabel atau lebih Metode analisis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan tersebut adalah analisis korelasi parsial, dimana terdapat variabel yang dinilai hubungannya dan variabel yang ditentukan sebagai variabel kontrol (Rusiadi; et al., 2014). Penggunaan analisis korelasi untuk melihat hubungan antar variabel tanpa menggunakan variabel kontrol dan dengan menggunakan variabel kontrol. Pendidikan masyarakat, Kemiskinan dan Pertumbuhan ekonomi secara bergantian ditempatkan sebagai variabel kontrol. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yaitu data jumlah kantor cabang (lima bank dengan asset terbesar), jumlah tabungan masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Data tersebut diambil dari tahun 2011-2016.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian atas variabel penelitian dilakukan dalam beberapa skema korelasi dengan menempatkan Tingkat Pendidikan, tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel kontrol secara bergantian terhadap variabel lain.

- a. Hubungan antara variabel jumlah kantor cabang, jumlah tabungan masyarakat, dan penduduk miskin dengan tingkat pendidikan sebagai variabel kontrol
Berdasarkan olah data hubungan antar variabel penelitian tanpa variabel kontrol tingkat pendidikan adalah :
 - 1) Nilai korelasi antara variabel jumlah kantor cabang dengan jumlah tabungan adalah 0,992 dengan signifikansi $0,001 < 0,05$ artinya hubungan antara jumlah kantor cabang dengan jumlah tabungan masyarakat signifikan. Ketika jumlah kantor cabang bertambah maka akan dapat menambah jumlah tabungan yang dihimpun dari masyarakat.
 - 2) Nilai korelasi antar jumlah kantor cabang bank dengan tingkat pendidikan sebesar 0.847 namun nilai signifikansi $0,070 > 0,05$ artinya terdapat hubungan antara jumlah kantor cabang dengan tingkat pendidikan masyarakat namun hubungan tersebut tidak signifikan. Ketika jumlah kantor cabang bank ditambah tidak serta merta sejalan dengan peningkatan pendidikan masyarakat. Atau dengan kata lain ketika pendidikan seseorang meningkat tidak lantas dapat mendorongnya untuk menabung.
 - 3) Nilai korelasi antara jumlah kantor cabang dengan tingkat kemiskinan penduduk adalah - 0,808 dengan nilai signifikansi $0,098 > 0,05$ artinya terdapat hubungan yang negatif namun tidak signifikan antara jumlah kantor cabang dengan tingkat kemiskinan. Ketika jumlah kantor cabang meningkat dapat mengurangi tingkat kemiskinan namun tidak dapat dipastikan (tidak signifikan).
 - 4) Nilai korelasi antara jumlah tabungan dengan tingkat pendidikan masyarakat sebesar 0,784 dengan nilai signifikansi $0,116 > 0,05$ artinya terdapat hubungan antara jumlah tabungan masyarakat dengan tingkat pendidikan masyarakat namun tidak signifikan. Ketika jumlah tabungan yang berhasil dihimpun oleh bank meningkat dapat sejalan dengan peningkatan pendidikan masyarakat namun hubungan ini tidak serta merta. Atau dengan kata lain hubungan ini dapat terjadi atau tidak.

- 5) Nilai korelasi jumlah tabungan masyarakat dengan tingkat kemiskinan penduduk sebesar - 0,753 dengan nilai signifikansi sebesar $0,142 > 0,05$. Artinya terdapat hubungan antara kedua variabel ini namun tidak signifikan. Ketika jumlah tabungan masyarakat mengalami peningkatan tidak serta merta terjadi penurunan tingkat kemiskinan, atau sebaliknya ketika tingkat kemiskinan di Indonesia menurun tidak dapat serta merta meningkatkan jumlah tabungan yang berhasil dihimpun oleh perbankan.
- Berdasarkan hasil olah data variabel penelitian dengan variabel tingkat pendidikan masyarakat sebagai variabel kontrol adalah sebagai berikut :
- 1) Nilai korelasi antara variabel jumlah kantor cabang dengan jumlah tabungan dimana tingkat pendidikan masyarakat sebagai variabel kontrol adalah 0,995 dengan signifikansi 0,05 artinya ada hubungan yang signifikan antara peningkatan jumlah kantor cabang perbankan dengan peningkatan jumlah tabungan masyarakat.
 - 2) Nilai korelasi antara jumlah kantor cabang dengan penduduk miskin sebesar 0,049 dengan signifikansi $0,95 > 0,05$ artinya tidak ada hubungan yang erat dan tidak signifikan antar kedua variabel ini.
 - 3) Nilai korelasi antara jumlah tabungan dengan tingkat penduduk miskin sebesar 0,010 dengan nilai signifikansi $0,990 > 0,05$ artinya tidak ada hubungan yang erat dan signifikan antara kedua variabel tersebut.

Hasil penelitian tersebut di atas dapat dilihat pada tabel hasil olah data berikut ini :

Tabel.2. Hubungan antara variabel jumlah kantor cabang, jumlah tabungan masyarakat, dan penduduk miskin dengan tingkat pendidikan sebagai variabel kontrol

Control Variables			J.K.Cabang	J.Tab	Pendk.Miskin	Pendidikan
Pendidikan	J.K.Cabang	Correlation	1.000	.995	.049	
		Significance (2-tailed)	.	.005	.951	
		df	0	2	2	
	J.Tab	Correlation	.995	1.000	.010	
		Significance (2-tailed)	.005	.	.990	
		df	2	0	2	
	Pendk.Miskin	Correlation	.049	.010	1.000	
		Significance (2-tailed)	.951	.990	.	
		df	2	2	0	

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations.

- b. Hubungan antara variabel jumlah kantor cabang, jumlah tabungan masyarakat dan tingkat pendidikan, dengan variabel kontrol tingkat penduduk miskin
 - 1) Nilai korelasi antara jumlah kantor cabang dan jumlah tabungan masyarakat dengan tingkat penduduk miskin sebagai variabel kontrol adalah 0,991 signifikansi $0,09 > 0,05$. Artinya ada hubungan namun tidak signifikan antara jumlah kantor cabang dengan jumlah tabungan jika tingkat penduduk miskin menjadi variabel kontrol
 - 2) Nilai korelasi antara jumlah kantor cabang dengan tingkat pendidikan adalah 0,0433 signifikansi $0,567 > 0,05$. Artinya hubungan kedua variabel ini dengan tingkat penduduk miskin sebagai variabel kontrol sangat lemah dan tidak signifikan.
 - 3) Nilai korelasi variabel jumlah tabungan masyarakat dengan tingkat pendidikan dimana tingkat penduduk miskin sebagai variabel kontrol sebesar 0,333 signifikansi $0,667 > 0,05$. Artinya ada hubungan yang erat namun tidak signifikan antara kedua variabel tersebut.

Control Variables			J.K.Cabang	J.Tab	Pendidikan	Pendk.Miskin
Pendk.Miskin	J.K.Cabang	Correlation	1.000	.991	.433	
		Significance (2-tailed)	.	.009	.567	
		df	0	2	2	

J.Tab	Correlation	.991	1.000	.333	
	Significance (2-tailed)	.009	.	.667	
	df	2	0	2	
Pendidikan	Correlation	.433	.333	1.000	
	Significance (2-tailed)	.567	.667	.	
	df	2	2	0	

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations.

- c. Hubungan variabel jumlah kantor cabang, jumlah tabungan, penduduk miskin, pendidikan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi
- 1) Nilai korelasi variabel pertumbuhan ekonomi dengan jumlah kantor cabang sebesar -0,964 signifikansi $0,08 > 0,05$. Artinya ada hubungan yang erat antar kedua variabel ini namun tidak signifikan. Ketika pertumbuhan ekonomi membaik dan cenderung naik dapat seiring dengan penambahan jumlah kantor cabang, namun bukan menjadi hal mutlak. Pertumbuhan ekonomi yang baik tentu bukan menjadi alasan menambah jumlah kantor cabang yang beroperasi.
 - 2) Nilai korelasi pertumbuhan ekonomi dengan jumlah tabungan sebesar -0,971 signifikansi $0,06 > 0,05$. Artinya saat pertumbuhan ekonomi membaik bisa saja mendorong seseorang untuk menyisihkan pendapatannya dalam bentuk tabungan namun hal ini tidak signifikan. Masyarakat memiliki opsi lain ketika akan menyisihkan sebagian pendapatannya.
 - 3) Nilai korelasi pertumbuhan ekonomi dan penduduk miskin sebesar 0,744 signifikansi $0,150 > 0,05$. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat dapat meningkatkan rasio penduduk miskin namun hal ini tidak signifikan. Kemiskinan merupakan bagian penting dalam menilai laju pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi dapat meningkat seiring dengan peningkatan angka kemiskinan, namun dapat juga menurunkan nilai kemiskinan.
 - 4) Nilai korelasi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat adalah -0,731 signifikansi $0,161 > 0,05$. Artinya hubungan antara kedua variabel ini kuat namun tidak signifikan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta meningkatkan atau menurunkan kualitas kuantitas pendidikan. Justru berdasarkan hasil penelitian ini hubungan kedua variabel bertolak belakang.
- d. Hubungan variabel jumlah kantor cabang, jumlah tabungan masyarakat, penduduk miskin, dan pendidikan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel kontrol.
- 1) Nilai korelasi variabel jumlah kantor cabang dan jumlah tabungan sebesar 0,889 signifikansi $0,111 > 0,05$ artinya ada hubungan antara variabel jumlah kantor cabang dengan jumlah tabungan yang berhasil dihimpun oleh bank namun tidak signifikan. Ketika jumlah kantor cabang bertambah tidak serta merta akan diikuti oleh penambahan jumlah tabungan masyarakat.
 - 2) Nilai korelasi antara variabel jumlah kantor cabang dan tingkat penduduk miskin sebesar -0,512 signifikansi $0,488 > 0,05$. Artinya ada hubungan yang erat antara peningkatan jumlah kantor cabang dengan penurunan tingkat penduduk miskin, namun hubungan ini tidak signifikan. Penambahan jumlah kantor cabang tidak serta merta dapat meningkatkan ataupun menurunkan tingkat penduduk miskin.
 - 3) Nilai korelasi jumlah kantor cabang dengan tingkat pendidikan masyarakat sebesar 0,782 signifikansi $0,218 > 0,05$ artinya kedua variabel ini memiliki hubungan yang erat namun tidak signifikan. Ketika jumlah kantor cabang meingkat bisa jadi sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia.
 - 4) Nilai korelasi jumlah tabungan dengan tingkat penduduk miskin sebesar -0,193 signifikansi $0,807 > 0,05$. Artinya jumlah tabungan yang berhasil dihimpun oleh bank meningkat tidak serta merta diikuti dengan peningkatan penduduk miskin.
 - 5) Nilai korelasi jumlah tabungan masyarakat dengan tingkat pendidikan masyarakat sebesar 0,456 signifikansi $0,544 > 0,05$. Artinya ketika variabel jumlah tabungan masyarakat mengalami peningkatan maka dapat meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat namun

tidak signifikan. Tingkat pendidikan masyarakat yang baik baik bisa menjadi latar belakang peningkatan pola pikir yang mengarah pada penyisihan pendapatan dalam bentuk tabungan, namun bisa jadi sebaliknya.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini adalah :

- a. Variabel jumlah kantor cabang memiliki hubungan yang sangat kuat, baik tanpa variabel kontrol maupun dengan variabel kontrol. Variabel kontrol tingkat pendidikan menghasilkan hubungan yang paling erat yaitu sebesar 0,995.
- b. Hubungan antara jumlah kantor cabang dengan tingkat pendidikan juga kuat, baik tanpa variabel kontrol maupun tidak. Variabel kontrol yang baik dalam menilai hubungan kedua variabel ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi.
- c. Hubungan antar variabel yang menghasilkan nilai korelasi parsial lemah ditunjukkan oleh hubungan jumlah tabungan dan tingkat pendidikan masyarakat dengan variabel penduduk miskin sebagai variabel kontrol.
- d. Hampir keseluruhan nilai signifikansi menunjukkan tidak signifikan, artinya hubungan antar variabel ini walaupun masuk kategori erat namun memiliki sisi lemah sehingga dibutuhkan modifikasi metode analisis lain atau variabel pendukung lainnya.
- e. Nilai signifikansi yang lemah ini membuktikan bahwa penilaian terkait variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan cukup kompleks yang membutuhkan faktor penilai lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Beck, Thorsten, Demrguc-Kunt, Asli & Levine, Ross, 2007. Finance, Inequality and the Poor. *Journal of Economic Growth*, Volume 12, Issue 1, pp 27-49.
- Kasmir, 2016. *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Malik, Zaini Abdul, N. Eva Fauziah dkk, 2015. Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Literasi Tata Cara Pembentukan Koperasi Syariah di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka, *Prosiding SnaPP, Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol 5, No 1. <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/127>.
- M, Isaac, W & K, Evelyn, N, 2012. Impact of Financial Literacy on Access to Financial Services in Kenya. *International Journal of Business an Social Science*. 3(19):42-50
- Rakhmindyarto & Syaifullah.2014. *Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan*. www.kemenkeu.go.id. Diakses Tgl 20 April 2016.
- Retno, Ely Kusuma. 2013. Pengaruh Kemiskinan dan Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Fakultas Ekonomi, UNESA Surabaya*. Ejournal.unesa.ac.id/article/5914/53/article.pdf, 1 November.
- Setiawan, Budi, 2015. *Teknik Praktis Analisis Data Penelitian Sosial & Bisnis dengan SPSS*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Suparmoko, 1997. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, Penerbit UGM, Yogyakarta.
- Thorsten,B,&A, Demirguc,K.2007. Finance, Inequality and the Poor.*Journal Economic Growth*.12:27-49
- Van der Werff AD, Hogarth JM, Peach ND. 2013. A Cross-Country Analysis of Financial Inclusion within the OECD. *Consumer Interest Annual*. Volume 59. www.bi.go.id